

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2020 merupakan kelanjutan RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2019 . Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2020 merupakan rencana kerja awal Pemerintahan Kepala Daerah Terpilih yang disusun berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2016 - 2021, serta arah kebijakan/issue-isue strategis dan prioritas yang harus diselesaikan pada Tahun 2020. Rencana Kerja 2020 ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada tahun 2020.

Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2020 disusun dalam kondisi masih dalam keterbatasan kemampuan keuangan yang dimiliki akibat krisis ekonomi global yang berdampak terhadap terjadinya defisit anggaran. Situasi ini menyebabkan kemungkinan tidak seluruh usulan pendanaan dapat dialokasikan.

Rencana Kerja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2020 secara prinsip memuat kebijakan pembangunan perhubungan dan kebutuhan pagu anggaran yaitu pembangunan sektor transportasi dan kegiatan pendukungnya yang akan dibiayai melalui APBD Provinsi. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2018 dan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2019, serta masalah dan tantangan yang kemungkinan akan dihadapi pada tahun 2020.

Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2020 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada agenda pembangunan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang perlu diselesaikan pada tahun 2020. Prioritas pembangunan tahunan disusun dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama;
4. Realistis untuk dilaksanakan.

Berdasarkan arah kebijakan pada masing-masing bidang pembangunan perhubungan, yang meliputi transportasi darat (angkutan jalan dan ASDP), transportasi kereta api, transportasi laut, transportasi udara, dan kegiatan penunjang transportasi, selanjutnya disusun program-program pembangunan yang dikaitkan dengan kebutuhan pendanaan.

Dengan demikian RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari penyusunan APBD. Berdasarkan cakupan tersebut, RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Menjadi acuan bagi seluruh jajaran Pemangku Kepentingan Sektor Perhubungan dan lembaga-lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Sektor Perhubungan, karena memuat seluruh kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perhubungan;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA SKPD sebagai bagian dalam penyusunan APBD/APBN, karena memuat arah kebijakan pembangunan Sektor Perhubungan selama satu tahun;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Dinas Perhubungan sebagai lembaga pemerintah.

Dokumen RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2020 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing-masing program. Kedudukan RENJA Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dalam kerangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD/RPJMD) serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN SKPD TAHUN LALU**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada Tahun 2018, merencanakan untuk melaksanakan sebanyak 33 Kegiatan dengan 10 Program dengan nilai pagu murni sebesar Rp. 35.000.000.000,-, dan memperoleh anggaran perubahan sebesar Rp. 60.000.000,- sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 35.060.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 26.492.573.037 atau sebesar 75,56 %. Sedangkan pada Tahun 2019 Dinas Perhubungan Provinsi Jambi mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 30.100.000.000,-.

#### EVALUASI PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2018

##### A. Urusan Wajib yang dilaksanakan

#### **PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018**

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran di atas dilaksanakan melalui kegiatan rutin dan pembangunan. Kegiatan-kegiatan dimaksud dibiayai melalui dana APBD Provinsi Jambi, yang antara lain berupa program pembangunan yaitu :

##### a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

1. Penyediaan surat menyurat realisasi keuangan sebesar 98,16 % dari total anggaran sebesar Rp. 38.152.000.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan dana sebesar Rp. 375.408.000,- realisasi keuangan sebesar 67,80 %.
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan dana sebesar Rp. 283.200.800,- realisasi keuangan sebesar 84,08 %.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan dana sebesar Rp. 313.431.000,- realisasi keuangan sebesar 96,74 %.
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dengan dana sebesar Rp. 138.788.000,- realisasi keuangan sebesar 93,23 %.

6. Penyediaan alat tulis kantor dengan dana sebesar Rp. 144.903.000,- realisasi keuangan sebesar 93,28 %.
7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan dana sebesar Rp. 75.227.500,- realisasi keuangan sebesar 83,26 %.
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan dana sebesar Rp.24.500.000,- realisasi keuangan sebesar 97,18 %.
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan dana sebesar Rp. 59.400.000,- realisasi keuangan sebesar 98,18 %.
10. Penyediaan makanan dan minuman dengan dana sebesar Rp. 35.000.000,- realisasi keuangan sebesar 59,53 %.
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan dana sebesar Rp. 375.000.000,- realisasi keuangan sebesar 99,82 %.

Secara keseluruhan outcome dari kegiatan-kegiatan ini adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan tugas-tugas operasional Dinas Perhubungan Provinsi Jambi.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi kegiatan :

1. Pengadaan Mobil Jabatan dengan realisasi fisik 100 % dan keuangan sebesar 95,05 % dari Rp. 430.000.000,-.
2. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan realisasi fisik 100 % dan keuangan sebesar 96,51 % dari Rp. 332.440.000,-.
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor realisasi fisik 100 % dan keuangan sebesar 96,46 % dari Rp. 539.968.000,-.
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan realisasi keuangan sebesar 90,50 % dari Rp. 517.860.000,- yaitu berupa perbaikan/perawatan kendaraan dinas/operasional.
5. Rehabilitasi Sedang/berat gedung kantor realisasi fisik 17,06 % dan keuangan sebesar 15,30 % dari anggaran Rp. 1.561.994.000,-.

Secara keseluruhan outcome dari kegiatan-kegiatan diatas adalah meningkatkan kenyamanan, kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas-tugas operasional.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, meliputi kegiatan :

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya berupa diadakannya pakaian dinas bagi pegawai, realisasi keuangan 93,14 % dari Rp. 78.000.000,- Outcomes yang diharapkan adalah untuk meningkatnya disiplin aparatur/ pegawai.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, meliputi kegiatan:

Pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, realisasi keuangan 15,63 % dari Rp. 130.000.000,- Outcomes yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia aparatur/pegawai.

e. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan :

1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, realisasi keuangan 88,37 % dari Rp. 4.325.651.000,-. Outcomes yang dicapai adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan, sedangkan output yang dihasilkan adalah berupa dokumen perencanaan pembangunan infrastruktur perhubungan.
2. Sosialisasi Kebijakan dibidang Perhubungan, realisasi keuangan 71,10 % dari Rp. 323.645.000,- Outcomes yang diharapkan adalah adanya peningkatan pemahaman terhadap peraturan dan ketentuan dibidang perhubungan sehingga akan tercipta ketertiban dan disiplin para pengguna, operator dan penyedia jasa perhubungan.
3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan realisasi keuangan 96,04 % dari Rp. 209.288.000,-. Outcomes dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pembangunan dan operasional sektor perhubungan yang efisien, efektif dan tepat sasaran sesuai yang direncanakan.

f. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, meliputi :

Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Jalan, realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,14 % dari pagu sebesar Rp. 276.460.000,-.

g. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, meliputi kegiatan :

1. Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan, dengan realisasi keuangan sebesar 20,77 % dari Rp. 353.576.000,-. Outcomes yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya rekomendasi kebijakan penanganan permasalahan transportasi sehingga dengan kegiatan ini pengetahuan, pemahaman dan perilaku masyarakat pengguna angkutan, operator, penyedia jasa serta aparaturnya sesuai ketentuan dan peraturan per-Undang-Undang an.
2. Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah, dengan realisasi fisik 98,31 % dan keuangan sebesar 98,31 % dari Rp. 206.942.000,- berupa telah dilaksanakannya kegiatan pengaturan dan pengendalian Angkutan Haji, Lebaran, serta pengawasan angkutan umum. Outcomes yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas pelayanan dan ketertiban pelayanan angkutan hari-hari besar keagamaan dan nasional.
3. Pengumpulan dan Analisis Database pelayanan angkutan, dengan realisasi fisik dan keuangan sebesar 97,07 % dari pagu sebesar Rp. 281.200.000,- Outcome yang dicapai adalah kemudahan dan meningkatnya kecepatan memperoleh data dan informasi dalam pengambilan kebijakan sektor perhubungan serta stake holder yang membutuhkan.
4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan dengan realisasi fisik 9,21 %, sedangkan realisasi keuangan 9,21 % dari Rp. 435.838.000,- Outcomes yang dicapai adalah meningkatnya kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan di sungai.
5. Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan dengan telah dilaksanakannya pemilihan awak kendaraan umum (AKUT), penguji dan lomba tertib lalu lintas sedangkan realisasi keuangan 95,15 % dari pagu sebesar Rp. 394.185.000,-. Outcomes yang dicapai adalah meningkatnya disiplin pengemudi/awak kendaraan umum dalam berlalu lintas.
6. Pengendalian Pengawasan Kegiatan Kelayakan Sertifikat Kapal Sungai dengan realisasi keuangan sebesar 84,86 % dari Rp. 235.288.000,-. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya keselamatan pelayaran bagi angkutan kapal sungai.

7. Pelayanan Domestik Haji Embarkasi dengan realisasi keuangan sebesar 95,21% dari Rp. 13.245.398.700,- Outcome yang diharapkan adalah terlayannya transportasi para jemaah haji yang akan menunaikan ibadah Haji.
- h. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan terdiri dari :
1. kegiatan Pembangunan Fasilitas Gedung Terminal VIP Room dan Koordinasi Bandara Perintis Provinsi Jambi. Realisasi fisik dari kegiatan ini adalah 100 % dengan keuangan sebesar 97,93 % dari pagu sebesar Rp. 283.082.290,-.
  2. Kegiatan Pengembangan Angkutan Umum Massal Aglomerasi, realisasi fisik dari kegiatan ini sebesar 100 % dengan keuangan sebesar 98,47 % dari pagu sebesar Rp. 994.948.000,-.
- i. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas berupa kegiatan :  
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas,. Output dari kegiatan ini adalah terpasangnya fasilitas keselamatan jalan berupa rambu lalu lintas, traffic light, cermin tikungan, RPPJ, warning light dan rekayasa lalu lintas. Realisasi fisik 39,01 % dan realisasi keuangan 38,75 % dari pagu sebesar Rp. 7.532.143.000,-. Outcomes yang diharapkan adalah meningkatnya kelancaran, ketertiban dan keselamatan angkutan jalan. Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program pengendalian dan Pengamanan lalulintas ini yaitu terwujudnya lalulintas yang selamat, aman, nyaman dan lancar.
- j. Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan dengan kegiatan :  
Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor dengan realisasi keuangan sebesar 62,88 % dari pagu sebesar Rp. 487.685.000,-. Outcomes yang dicapai adalah meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan barang.

**AKUNTABILITAS KEUANGAN**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.863.010.300	1.637.793682	204.096.618	
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3.382.262.000	1.958.089.300	1.424.172.700	
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	78.000.000	72.649.500	5.350.500	
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	130.000.000	20.319.864	109.680.136	
5.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	4.858.584.000	4.253.494.041	480.365.959	
6.	Program Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	276.460.000	271.322.000	5.138.000	
7.	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	15.152.427.700	13.775.476.410	1.802.951.290	
8.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	1.299.428.000	1.278.030.290	21.397.710	
9.	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	7.532.143.000	2.918.723.450	4.273.263.550	
10.	Program Peningkatan Kelayakan Pengoperasian Kendaraan	487.685.000	306.674.500	181.010.500	
	<b>TOTAL</b>	35.060.000.000	26.492.573.037	8.567.426.963	

**PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2018**

Pada tahun 2018 , Dinas Perhubungan Provinsi Jambi memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. Rp.35.060.000.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 10 Program dan 33 kegiatan. Program kegiatan Tahun 2019 pada saat Rencana Kerja Tahun 2020 ini disusun masih dalam tahap pelaksanaan, pelelangan maupun persiapan.



## **PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA PEMECAHANNYA**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Sektor Perhubungan sampai dengan saat ini antara lain :

1. Overloading dan beban angkutan jalan yang semakin berat, belum diimbangi dengan sarana angkutan alternatif yang lebih representative. Di lain pihak kualitas dan daya dukung infrastruktur transportasi yang relatif rendah, khususnya prasarana jalan dan jembatan dengan MST maksimal 8 ton dan lebar rata-rata 6 meter. Sementara kemajuan teknologi transportasi yang semakin berkembang dengan daya angkut semakin besar (tekanan gandar mencapai lebih dari 12 ton), sehingga jalan dan jembatan yang ada tidak mampu bertahan lama (sering mengalami kerusakan).
2. Perkembangan Angkutan yang berbasis Online saat ini yang memerlukan Pengaturan/regulasi serta Penindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukannya.
3. Keterbatasan infrastruktur perhubungan yang tersedia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas yang tersedia.
4. Infrastruktur Perhubungan yang rata-rata belum mampu memberikan rasa aman, nyaman dan selamat kepada pengguna jasa perhubungan.
5. Masih rendahnya pemahaman dan disiplin masyarakat pengguna jasa perhubungan, penyedia jasa dan pemakai jalan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
6. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan, sehingga sering terjadi overlapping dalam pelaksanaan kegiatan operasional di lapangan.
7. Masih minimnya sumber daya manusia perhubungan yang memiliki kompetensi, kualifikasi teknis dan profesional di bidang perhubungan.
8. Minimnya sumber dana untuk pembangunan/ peningkatan dan pemeliharaan sarana/prasarana perhubungan, dalam rangka mewujudkan sarana/ prasarana yang representatif dan memenuhi standar Nasional dan Internasional.

Upaya Pemecahan dari permasalahan yang ada yaitu :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan personil Dinas Perhubungan Provinsi Jambi melalui pelatihan, diklat maupun kursus.
2. Melakukan efisiensi penggunaan dana yang ada dengan membuat skala prioritas yang bertujuan agar program-program yang dianggap strategis dapat terlaksana dengan baik.
3. Mengusulkan secara berkelanjutan kegiatan perencanaan dilingkungan perhubungan.
4. Mendukung upaya program zero overload dan Zero accident.
5. Mengupayakan peningkatan dana yang bersumber dari APBN Kementerian Perhubungan serta menyiapkan lebih dini dan lengkap dokumen-dokumen dan data dukung usulan pembangunan.
6. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi dengan BUMN sektor perhubungan guna mengalokasikan dana yang lebih besar lagi dalam peningkatan/ pengembangan bandar udara dan pelabuhan yang ada di Provinsi Jambi.
7. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota guna memperoleh sinergisitas dan integrasi pembangunan sektor perhubungan di Provinsi Jambi.

### **BAB III**

## **KONDISI SEKTOR PERHUBUNGAN**

Sektor perhubungan mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting yaitu sebagai pendorong, pendukung dan penunjang roda perekonomian, sosial budaya, politik dan hankam. Mengingat pentingnya peranan dan fungsi tersebut, maka sektor perhubungan dengan segala eksistensinya selalu diarahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa, melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana/prasarana serta sistem pengaturan dan pengendalian operasionalisasinya.

Disisi lain, perubahan dan pergeseran pertumbuhan ekonomi daerah Jambi saat ini memerlukan peningkatan kuantitas dan kualitas jasa perhubungan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor lain di Provinsi Jambi dewasa ini, pembangunan sektor perhubungan diupayakan untuk dapat menekan biaya transportasi sehingga produk-produk daerah memiliki daya saing dan lebih kompetitif di pasar regional, nasional dan internasional.

Guna menunjang hal tersebut diatas, maka diperlukan sistem transportasi yang efisien, efektif dan terpadu baik antar maupun intra moda angkutan dalam satu kesatuan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan transportasi darat, laut dan udara. Untuk itu perlu dilakukan penataan dan pendayagunaan sektor perhubungan daerah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi pada khususnya dan Sistem Transportasi Nasional pada umumnya, agar tercapai sinergi dan sinkronisasi antara kepentingan daerah, nasional dan seluruh pihak yang berkepentingan (stake holder).

Sebagai langkah awal, maka perlu diketahui potensi dan kondisi Sektor Perhubungan di Provinsi Jambi yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut :

## 1. PERHUBUNGAN DARAT

### a. *Angkutan Jalan*

#### 1) Prasarana Jalan

Kondisi prasarana jalan di Provinsi Jambi secara umum telah mampu menghubungkan/menjangkau hampir seluruh wilayah/daerah di Provinsi Jambi dan sentra-sentra produksi yang ada. Prasarana jalan di Provinsi Jambi menurut status dan kewenangannya dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu Jalan Nasional dengan panjang 1.316,93 km, Jalan Provinsi sepanjang 1.129 Km dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 5.533,79 km.

Jaringan jalan di Provinsi Jambi yang dominan sebagai pergerakan kendaraan lokal, regional maupun lalu lintas terusan dihubungkan melalui 3 (tiga) jaringan jalan utama, yaitu :

- Bagian Barat/Jalan Lintas Barat sepanjang 241,206 km, ke arah utara menghubungkan Provinsi Jambi dengan kota-kota di Provinsi Sumatera Barat dan ke selatan menghubungkan Provinsi Jambi dengan kota-kota di Provinsi Bengkulu dan Sumatera Selatan. Jalur ini cukup mantap untuk mendukung pergerakan dan arus barang/penumpang.
- Bagian Timur/Jalan Lintas Timur sepanjang 214,41 km, ke arah utara menghubungkan Jambi dengan Provinsi Riau dan Sumatera Utara dan ke selatan menghubungkan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bagian Tengah/Jalan Lintas Tengah sepanjang 929,366 km, yaitu jalur penghubung yang melintang dari arah barat ke timur yang menghubungkan daerah-daerah di dalam wilayah Provinsi Jambi (Jambi, Muara Bulian, Muara Bungo, Sarolangun, Sungai Penuh dan Kuala Tungkal serta Muara Sabak).

#### 2) Terminal

Sebagai salah satu simpul pelayanan transportasi jalan, maka keberadaan terminal sangat berperan mendukung kelancaran, ketertiban dan keteraturan pelayanan sarana angkutan jalan baik untuk angkutan orang maupun barang.

Terminal yang ada di Provinsi Jambi terdiri dari terminal penumpang dan terminal barang. Terminal Penumpang sebanyak 9 buah dan terminal barang sebanyak 2 buah (Kota Jambi dan Muara Bungo).

Terminal penumpang yang ada di Provinsi Jambi tersebut yaitu :

- \* Terminal Type A : Terminal Alam Barajo (Kota Jambi), Terminal Kumun (Kerinci), Terminal Sarolangun (Sarolangun)
- \* Terminal Type B : Terminal Paal X dan Terminal Sijenjang (kota Jambi), Terminal Muara Bulian (Batanghari), Terminal Tebo dan Terminal Pembengis (Tanjab Barat), Terminal Bungo Baru (Bungo), Terminal Pulau Tujuh (Merangin).
- \* Terminal Type C : Terminal Rawasari (Kota Jambi) dan Terminal Muara Tembesi (Batanghari).

### 3) Sarana Angkutan.

Sarana angkutan penumpang di jalan yang beroperasi di Provinsi Jambi terdiri dari Sarana Angkutan Umum dan Angkutan Bukan Umum. Menurut penyelenggaraannya, angkutan umum di Provinsi Jambi dibagi dalam beberapa jenis pelayanan yaitu :

- Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), menghubungkan kota-kota antar provinsi dengan Jambi sebagai tempat asal/tujuan perjalanan maupun sebagai tempat transit/lintasan dari kota-kota di Sumatera maupun Jawa.
- Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), menghubungkan kota-kota di dalam wilayah Provinsi Jambi.
- Angkutan Pariwisata, yaitu angkutan alternatif yang melayani dengan tujuan daerah / obyek pariwisata.
- Angkutan Sewa, yaitu angkutan alternatif antar kota dengan pelayanan sampai ke alamat tujuan.
- Kondisi angkutan jalan di Provinsi Jambi baik untuk angkutan orang maupun barang, pada umumnya relatif baik dan lancar. Namun pada ruas-ruas jalan tertentu kondisi prasarana jalan yang ada mengalami kerusakan seperti ruas jalan Muara Tembesi-Sarolangun, Jalan Lintas Timur, Jalan

Lingkar Kota Jambi dan Jalan Tempino-Muara Bulian serta Jalan Bangko-Kerinci yang rawan longsor yang pada gilirannya memberi dampak terhadap bertambahnya waktu tempuh perjalanan dan biaya operasi kendaraan.

Adapun permasalahan yang dihadapi Angkutan Jalan di Provinsi Jambi, antara lain diinventarisir sebagai berikut :

- Pelayanan Jasa Transportasi yang belum merata ke setiap pusat kegiatan dalam Provinsi Jambi.
- Kurangnya keterpaduan antar dan intra moda yang mengakibatkan kurang efektifnya pelayanan jasa angkutan jalan.
- Masih rendahnya disiplin dan ketertiban para pengguna jasa angkutan jalan, penyedia jasa dan masyarakat dalam mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Belum adanya pengaturan jaringan trayek dan jaringan lintas untuk pelayanan dalam provinsi.
- Terbatasnya dana untuk pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas keselamatan jalan.
- Belum munculnya minat swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan LLAJ.

*b. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan*

Angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Provinsi Jambi saat ini masih menjadi angkutan yang cukup dominan terutama bagi masyarakat/perusahaan-perusahaan yang berada di sepanjang aliran sungai khususnya sebagai angkutan alternatif diantaranya untuk angkutan produk-produk pertanian, perkebunan dan hasil hutan.

Dari sekian banyak sungai yang mengalir di Provinsi Jambi, maka sungai-sungai yang dapat dilayari dan dimanfaatkan sebagai sarana angkutan antara lain Sungai Batanghari (1440 km), Sungai Pengabuan (75 km), Sungai Berbak (42 km), Sungai Mendahara (70 km), Sungai Batang Tembesi (150 km), Sungai Batang Merangin (60 km), Sungai Batang Tebo (140 km), Sungai Batang Tabir (150 km), Sungai Betara (85 km) dan Sungai Pemusiran (46 km).

Untuk mendukung kegiatan angkutan sungai dan moda angkutan lain di Provinsi Jambi, Sejak awal tahun 2017 telah dilayani angkutan Perintis penyeberangan Ro-Ro di Kuala Tungkal untuk melayani lintasan Kuala Tungkal-Tanjung Uban (Provinsi Riau).

Permasalahan mendasar yang terjadi pada angkutan sungai, danau dan penyeberangan di Provinsi Jambi antara lain :

- Belum adanya acuan tentang standar minimal keselamatan bagi kendaraan angkutan sungai.
- Masih tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara angkutan sungai dan angkutan laut.
- Belum adanya pengaturan tentang jaringan trayek angkutan sungai.
- Kurangnya fasilitas keselamatan pelayaran berupa rambu-rambu sungai.

## **2. PERHUBUNGAN LAUT**

Berbeda dengan Sub Sektor Perhubungan Darat, unit-unit kerja yang ada pada Sub Sektor Perhubungan Laut sampai saat ini pengelolaan maupun sumber dayanya belum diserahkan kepada Daerah dan penanganannya masih berada di Pemerintah Pusat.

Kegiatan angkutan laut di Provinsi Jambi saat ini dilayani melalui Pelabuhan Umum (terdiri dari 3 (tiga) pelabuhan yang diusahakan dan 2 (dua) pelabuhan yang tidak diusahakan) dan Pelabuhan Khusus. Pada saat ini, dalam rangka meningkatkan operasionalisasi dan optimalisasi fungsi transportasi laut di Provinsi Jambi sedang dilaksanakan pembangunan Pelabuhan Laut Ujung Jabung. Pelabuhan ini diharapkan akan dapat berfungsi sebagai outlet Provinsi Jambi dan pelabuhan utama guna mendukung kelancaran, kesinambungan logistik serta program tol laut.

Pelabuhan Umum yang ada di Provinsi Jambi dikelola dan diusahakan oleh BUMN (PT. Pelindo II) dan Pemerintah (Unit Pengelola Pelabuhan). Sedang Pelabuhan Khusus dikelola dan diusahakan sendiri oleh perusahaan (swasta).

#### *a. Pelabuhan Umum*

##### 1) Pelabuhan Yang Diusahakan

Pelabuhan yang diusahakan di Provinsi Jambi terdiri dari Pelabuhan Talang Duku, Pelabuhan Muara Sabak dan Pelabuhan Kuala Tungkal. Ketiga pelabuhan tersebut dikelola dan diusahakan oleh PT. (Persero) Pelindo II Cabang Jambi, sedang tugas pemerintahan dilaksanakan oleh Adpel Jambi, Bea Cukai, KPPP, Navigasi, Imigrasi dan Karantina Kesehatan. Aktivitas kegiatan di Pelabuhan Talang Duku dan Muara Sabak saat ini digunakan untuk jasa angkutan barang baik antar pulau maupun antar negara (ekspor impor).

Prasarana yang tersedia di 3 (tiga) pelabuhan yang diusahakan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

##### a. Pelabuhan Talang Duku.

- Dermaga ferrocement dengan panjang 66,8 x 20 m, 2 buah.
- Dermaga Besi 62 x 20 m 1 buah
- Gudang 2.040 m<sup>2</sup> dan lapangan penumpukan 5.000 m<sup>2</sup>
- Areal perkantoran seluas 900 m<sup>2</sup>
- Perlatan telekomunikasi jenis SSB, VHF dan HT
- Fasilitas bongkar muat jenis gantry crane, mobil crane dan forklift

##### b) Pelabuhan Kuala Tungkal

- Dermaga lama ukuran 20,50 m x 7,50 m. dan dermaga baru ukuran 75 m x 15,50 m.
- Gudang 600 m
- Areal perkantoran seluas 100 m<sup>2</sup>
- Terminal penumpang dengan luas 150 m<sup>2</sup>.
- Peralatan telekomunikasi. jenis SSB, HT dan VHF.

##### c) Pelabuhan Muara Sabak

Pelabuhan Muara Sabak sampai dengan saat ini belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terdapat beberapa fasilitas pelabuhan yang belum terpenuhi, disamping akses jalan yang belum memadai sesuai dengan rencana.



Prasarana yang tersedia saat ini baik yang dibangun dengan menggunakan APBN murni maupun DIP Suplemen, meliputi :

- Dermaga beton ukuran 50 m x 15 m
- Trestle beton ukuran 47 m x 8 m
- Penimbunan untuk lapangan penumpukan 50.465 m<sup>3</sup>
- Talud Sand Cement Bags, 803 m<sup>3</sup>.
- Cause way ukuran 200 m<sup>2</sup>
- Catwalk ukuran 2 x 25 m
- Mooring dolphin, 2 unit
- Bolder darat, 2 unit
- Lapangan penumpukan dan parkir 2.337 m<sup>2</sup>

Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak pada masa yang akan datang diarahkan untuk dapat menggantikan peran Pelabuhan Talang Duku yang sudah tidak representatif lagi.

## 2) Pelabuhan Yang Tidak Diusahakan

Pelabuhan lain yang terdapat di Provinsi Jambi adalah Pelabuhan Nipah Panjang dan Pelabuhan Mendahara. Kedua pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan yang tidak diusahakan yaitu pelabuhan yang pengelolaan dan pengusahaannya dilakukan oleh Pemerintah (Ditjen Perhubungan Laut) dalam hal ini dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP)/ Kantor Pelabuhan (Kanpel).

Untuk 2 (dua) pelabuhan yang tidak diusahakan tersebut tersedia fasilitas sebagai berikut :

### a. Pelabuhan Nipah Panjang

- Dermaga kayu ukuran 20 x 4 m.
- Lapangan penumpukan 480 m<sup>2</sup>
- Peralatan Telekomunikasi : SSB dan HT.

Pelabuhan Nipah Panjang yang saat ini berada di pusat permukiman penduduk, direncanakan akan dilakukan relokasi ke arah hilir dari lokasi saat ini dan dikembangkan sesuai dengan masterplan yang telah dibuat.

b. Pelabuhan Kuala Mendahara

- Dermaga ukuran 40 x 4 m.
- Terminal penumpang, 100 M2.
- Peralatan telekomunikasi : SSB dan HT.

3) *Pelabuhan Khusus*

Disamping Pelabuhan Umum di atas, di Provinsi Jambi terdapat juga Pelabuhan Khusus yang dikelola dan diusahakan sendiri oleh swasta. Dermaga-dermaga khusus yang terdapat di Provinsi Jambi mayoritas berada di sepanjang pinggiran Sungai Batanghari, Sungai Pengabuan, Sungai Batang Tembesi, Sungai Berbak dan lain-lain. Dermaga-dermaga khusus tersebut secara teknis operasionalnya diawasi oleh Pemerintah. Dari DUKS di Provinsi Jambi yang terdaftar sampai saat ini pada umumnya merupakan pelabuhan pendukung aktivitas industri perkayuan, perkebunan dan pertambangan.

Permasalahan yang dihadapi sub sektor perhubungan laut di Provinsi Jambi, antara lain adalah :

- Letak dermaga/pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Jambi berada di sepanjang aliran sungai, sehingga kapasitas alur pelayaran terbatas. Kondisi ini mengakibatkan pada jenis/ukuran kapal yang dapat berlabuh juga terbatas.
- Tingkat sedimentasi yang relatif tinggi di muara sungai, sehingga memerlukan pemeliharaan rutin (pengerukan).
- Belum berfungsinya Pelabuhan Muara Sabak yang akan mendukung pemasaran potensi Provinsi Jambi.
- Belum sinkronnya kepentingan pusat dan daerah khususnya dalam pengembangan angkutan laut di Provinsi Jambi.
- Terbatasnya fasilitas pelabuhan yang ada khususnya di Pelabuhan-pelabuhan Umum.

PELABUHAN UJUNG JABUNG

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang terjadi pada sub sektor perhubungan laut di Provinsi Jambi dan sesuai program strategis dan prioritas pembangunan yang berbasis koridor ekonomi dan MP3EI, maka sejak tahun 2011

telah mulai dirintis dan akan terus dikembangkan pusat distribusi berupa pelabuhan laut di Ujung Jabung (telah masuk di dalam RTRW Provinsi Jambi Tahun 2013-2033). Pelabuhan laut di Ujung Jabung ini direncanakan akan berfungsi sebagai Outlet Provinsi Jambi dan daerah sekitarnya, sehingga dapat mendorong tumbuh kembangnya aktivitas serta kelancaran mobilitas angkutan berbagai komoditas unggulan Provinsi Jambi. Untuk mendukung kelancaran dan percepatan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung ini, Pemerintah Provinsi Jambi telah menyusun dokumen perencanaan berupa FS, Masterplan dan SID/DED pada tahun 2012 serta pembebasan lahan pada tahun 2013 melalui dana APBD Provinsi Jambi. Disamping itu, dana APBN Kementerian Perhubungan RI (Ditjen Perhubungan Laut) sejak TA, 2014 pembangunan fisik Pelabuhan Laut Ujung Jabung telah dilaksanakan. Pelabuhan Ujung Jabung ini direncanakan akan dibangun secara bertahap dan diharapkan dapat terbangun sesuai masterplan.

### **3. PERHUBUNGAN UDARA**

Kegiatan angkutan udara di Provinsi Jambi dilayani oleh PT. (Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi sebagai bandara utama yang terletak di Kota Jambi  $\pm$  7 km dari pusat kota. Dengan fasilitas yang ada saat ini Bandara Sultan Thaha mampu didarati oleh pesawat sejenis B.737-400/B.737-900ER. Rute penerbangan yang dilayani di Bandara Sultan Thaha Jambi adalah rute Jakarta-Jambi, Jambi-Batam, Jambi-Palembang, Jambi-Pekanbaru, Jambi-Bungo dan Jambi-Kerinci. Perusahaan penerbangan yang melayani rute dimaksud adalah Garuda Indonesia, Citylink, Batik Air, Lion Air, Sriwijaya Air, Nam Air, Wing Air dan Susi Air.

Disamping Bandara Sultan Thaha Jambi, di Provinsi Jambi juga terdapat bandara lain yaitu Depati Parbo Kerinci yang kini mampu didarati oleh pesawat sejenis F.50 dengan rute penerbangan Jambi-Kerinci menggunakan pesawat Wing Air dan Cassa oleh Susi Air. Bandara Bungo sudah mulai beroperasi yang dilayani oleh Sriwijaya Air dengan rute Bungo-Jakarta.

Permasalahan yang dihadapi oleh sub sektor perhubungan udara di Provinsi Jambi, antara lain :

- Terbatasnya rute penerbangan yang dilayani sehingga menimbulkan terjadinya back track traffic yang menyebabkan bertambahnya waktu dan biaya.

- Terbatasnya prasarana navigasi dan alat bantu pendaratan, sehingga mengganggu pendaratan pesawat apabila cuaca dan jarak pandang sedikit terganggu.
- Terbukanya potensi dan peluang investasi di Provinsi Jambi bagi investor dalam dan luar negeri yang memerlukan dukungan angkutan yang cepat (angkutan udara), sementara rute penerbangan yang dilayani masih terbatas.
- Terbatasnya anggaran untuk percepatan penyelesaian pengembangan Bandara Bungo, Bandara Depati Parbo Kerinci dan Bandara Sultan Thaha Jambi sesuai masterplan.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN**

Dengan melihat kondisi dan potensi sektor perhubungan di Provinsi Jambi, kebijakan pembangunan perhubungan di Provinsi Jambi diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perekonomian di Provinsi Jambi, dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan serta diversifikasi industri baik hulu maupun hilir yang berbasis pada potensi andalan daerah. Secara bersamaan, pembangunan/peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan diarahkan untuk menjamin kelancaran mobilitas orang, sumber daya dan distribusi barang/jasa sehingga mempunyai nilai ekonomis tinggi dan mampu bersaing.

Kebijakan pembangunan Sektor Perhubungan di Provinsi Jambi diarahkan sebagai berikut :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan prasarana dan sarana antara lain melalui rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana transportasi, pos dan telekomunikasi.
2. Melanjutkan restrukturisasi dan reformasi di sektor transportasi, pos dan telekomunikasi.
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan prasarana dan sarana transportasi.
4. Pembangunan / peningkatan prasarana dan sarana transportasi.

Selanjutnya dari kebijakan sektor tersebut dijabarkan ke dalam kebijakan sub sektor sebagai berikut :

#### **1. Sub Sektor Perhubungan Darat dan Kereta Api**

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan jalan, fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta kesadaran tertib lalu lintas kepada pengemudi kendaraan umum dan pengguna jalan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan.

- b. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan transportasi jalan yang menyeluruh baik di pedesaan, dalam kota, antar kota dalam provinsi dan antar kota antar provinsi, dalam rangka mewujudkan terciptanya kelancaran arus penumpang dan pendistribusian barang.
- c. Pengembangan dan peningkatan kinerja fasilitas angkutan umum, demi terciptanya pelayanan angkutan yang tertib, teratur, andal dan terjangkau.
- d. Terciptanya optimalisasi peranan dan pemanfaatan sarana/prasarana transportasi darat dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa angkutan sungai dan penyeberangan dalam menembus keterisolasian, melalui rehabilitasi dermaga sungai dan pemberian subsidi dengan tetap mengutamakan keselamatan dalam wujud pemasangan rambu sungai.
- f. Peningkatan dan pembinaan pengawasan lalu lintas sungai dan penyeberangan menuju ke arah lebih terjaminnya keselamatan transportasi.
- g. Penyediaan sarana dan prasarana angkutan sungai/pedalaman dalam rangka pemberdayaan perekonomian penduduk di daerah hulu sungai.
- h. Pengembangan prasarana dan sarana angkutan penyeberangan sebagai angkutan alternatif dalam rangka mendukung program pembangunan Kota Kuala Tungkal sebagai salah satu pintu gerbang Provinsi Jambi.
- i. Mendukung upaya percepatan pembangunan Trans Sumatera Railway di Provinsi Jambi dalam rangka mendukung kelancaran angkutan menuju ke Outlet.
- j. Meningkatkan kemampuan SDM, pemantapan kelembagaan serta peningkatan koordinasi antar instansi.

## **2. Sub Sektor Perhubungan Laut**

- a. Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Muara Sabak untuk melayani arus bongkar/muat barang, sehingga memenuhi persyaratan sebagai pelabuhan substitusi dari pengalihan operasional Pelabuhan Talang Duku.

- b. Upaya percepatan penyelesaian pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung sehingga akan mampu berperan sebagai pelabuhan Tol Laut dan pusat distribusi Provinsi Jambi.
- c. Pengembangan dan optimalisasi pemberdayaan pelabuhan-pelabuhan dalam rangka antisipasi terhadap tuntutan kerjasama IMS-GT/SIBAJO dan era globalisasi.
- d. Peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana prasarana operasional pelabuhan dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas.
- e. Meningkatkan kualitas dan daya dukung pelayanan kesyahbandaran.
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya dukung pelayanan keselamatan pelayaran.
- g. Fasilitasi upaya peninjauan kembali Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Menteri tentang DLKR/DLKP pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Jambi.

### **3. Sub Sektor Perhubungan Udara**

- a. Pengembangan Bandara Sultan Thaha dalam rangka meningkatkan status sebagai bandara internasional maupun bandara embarkasi haji serta menjadikan bandara sebagai Zoo Airport.
- b. Pengembangan jalur penerbangan internasional untuk menunjang kerjasama IMS-GT dan kawasan Asean-China Free Trade Agreement.
- c. Peningkatan kualitas jasa bandar udara melalui peningkatan fasilitas penerbangan dan sumber daya manusia.
- d. Pengembangan Bandar Udara Depati Parbo sebagai bandar udara feeder untuk menunjang program pengembangan kawasan Kerinci sebagai Rest Area Provinsi Jambi.
- e. Upaya percepatan penyelesaian pembangunan Bandara Bungo.

## **BAB V**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk lebih mempertajam dalam mewujudkan arah dan kebijakan Sektor Perhubungan di Provinsi Jambi, maka ditetapkan Tujuan Strategis dan Sasaran yaitu :

#### **1. Tujuan Strategis**

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan dirumuskannya tujuan Strategis ini, maka Dinas Perhubungan akan dapat secara cepat dan tepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Perumusan tujuan Strategis ini juga akan memungkinkan Dinas Perhubungan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai visi dan misi yang ditetapkan, maka setiap tujuan Strategis yang ditetapkan harus memiliki sasaran dan indikator kinerja (performance indicator) yang dapat diukur.

**Tujuan Strategis dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :**

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi;
- Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan dan operasional transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur, andal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien.
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapabilitas sumber daya manusia menuju clean government dan good governance.
- Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan.

#### **2. Sasaran**

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan memiliki indikator kinerja yang dapat diukur. Sasaran Strategis ini menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan



dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan, melalui serangkaian kegiatan dan akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kerja (Performance Plan).

Penetapan sasaran Strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran-sasaran Strategis yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan Strategis yang terkait. Oleh karena itu apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai maka diharapkan tujuan Strategis terkait juga akan dapat dicapai.

Pencapaian sasaran Strategis ini merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Dinas Perhubungan, karena sasaran Strategis merupakan bagian integral dari proses perencanaan Strategis yang sifatnya menyeluruh.

Selanjutnya untuk masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Seperti halnya sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan juga seluruhnya mendukung terhadap pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan sasaran dan program Dinas Perhubungan dijabarkan sebagai berikut :

**Tujuan 1 :**

***“Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapabilitas sumber daya manusia menuju clean government dan good governance”.***

Sasaran strategis dan program untuk mewujudkan tujuan ini adalah :

Sasaran	Program
1 Meningkatkan akuntabilitas kelembagaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki daya saing.	1 Program pelayanan administrasi perkantoran. 2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 3 Program peningkatan disiplin aparatur. 4 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

**Tujuan 2 :**

***“Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana, prasarana, fasilitas keselamatan dan perencanaan transportasi”.***

Sasaran Strategis dan programnya adalah :

Sasaran	Program
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi.	1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan. 2. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana LLAJ. 5. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana LLASDP 6. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Udara 7. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut.

**Tujuan 3 :**

***“Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana perhubungan”.***

Sasaran Strategis dan programnya adalah :

Sasaran	Program
1. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana transportasi.	1. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. 2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

**Tujuan 4 :**

***“Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan operasional transportasi yang aman, nyaman, lancar, tertib, teratur, handal, selamat, terjangkau, efektif dan efisien”.***

Sasaran Strategis dan Programnya adalah :

Sasaran	Program
1. Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi yang efektif, efisien dan taat aturan.	1. Program peningkatan pelayanan angkutan
2. Meningkatnya pelayanan jasa angkutan.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.

**3. Program dan Kegiatan 2019**

Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program dengan kata lain kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan ini berdimensi waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan merupakan aspek operasional dari suatu rencana Strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.

Program dan kegiatan pada masing-masing tujuan strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Tahun 2019 dijabarkan pada halaman sebagai berikut :

Indikator program, kegiatan, target dan capaian serta usulan pagu indikatif program kegiatan untuk Tahun 2019 secara rinci disampaikan pada Tabel T-V.C.1 dan Tabel T-V.C.2 terlampir.

No.	Program dan Kegiatan
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat</li> <li>2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.</li> <li>3. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan</li> <li>4. Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor</li> <li>5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.</li> <li>6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor</li> <li>7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.</li> <li>8. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan</li> <li>9. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunankantor</li> <li>10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman.</li> <li>11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.</li> </ol>
2.	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional (Kendaraan Patroli Roda 4 Roda 2 dan Mobil Derek.</li> <li>2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.</li> <li>3. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.</li> <li>4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional.</li> <li>5. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat gedung kantor.</li> </ol>
3.	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.</li> </ol>
4.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan pelatihan formal.</li> </ol>
5.	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.</li> <li>2. Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan.</li> <li>3. Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.</li> <li>4. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan di Bidang Perhubungan.</li> <li>5. Pembangunan sarana dan prasarana dan pelayanan Perhubungan.</li> <li>6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.</li> </ol>
6.	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana Perhubungan</li> <li>2. Kegiatan Rehabilitasi/ pemeliharaan fasilitas penunjang keselamatan Transportasi.</li> </ol>

<b>7.</b>	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan.</li> <li>2. Penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah.</li> <li>3. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan.</li> <li>4. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan.</li> <li>5. Fasilitas perijinan dibidang perhubungan.</li> <li>6. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan.</li> <li>7. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan.</li> <li>8. Pengendalian pengawasan kegiatan kelayakan sertifikat kapal sungai.</li> </ol>
<b>8.</b>	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Fasilitas pelabuhan laut Ujung Jabung</li> <li>2. Peningkatan/pengadaan/pembangunan sarana dan prasarana transportasi udara.</li> <li>3. Pembangunan gedung kantor dinas perhubungan.</li> <li>4. Pembangunan fasilitas dan prasarana transportasi Laut.</li> <li>5. Pengembangan transportasi Multi Moda.</li> <li>6. Pengembangan angkutan umum massal aglomerasi.</li> <li>7. Pengembangan fasilitas penunjang Pelabuhan Muara Sabak.</li> <li>8. Pengembangan/pembangunan terminal penumpang tope B.</li> <li>9. Pengadaan lahan pembangunan infrastruktur transportasi.</li> <li>10. Pembangunan Fasilitas gedung terminal VIP Room Bandara dan Koordinasi Bandara Perintis Provinsi Jambi</li> </ol>
<b>9.</b>	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan rambu-rambu Lalu Lintas.</li> <li>2. Pengadaan dan pemasangan Marka Jalan.</li> <li>3. Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan.</li> <li>4. Kegiatan pembangunan keselamatan Transportasi Darat.</li> </ol>
<b>10.</b>	<b>Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor.</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan alat Pengujian kendaraan bermotor.</li> <li>2. Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor.</li> </ol>

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Tahun 2020 merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari sebagian Rencana Strategis 2016 – 2021 serta program kebijakan dan issue-isue strategis pada masa transisi Kepala Daerah, secara detail memuat tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam tahun 2020, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi merencanakan 46 kegiatan dalam 10 program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dari APBD.

Sebagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa program dan kegiatan dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Jambi pada tahun 2020 hanya melaksanakan program kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD).